

## **PROGRAM PENANGULANGAN KEMISKINAN DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Oleh : Drs. Soetopo Sahib  
Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi DIY

### **I. Kebijakan Pemerintah di Bidang Pendidikan Luar Sekolah**

Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 amanatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Pembangunan nasional di bidang pendidikan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil makmur, serta memungkinkan para warganya mengembangkan diri baik berkenaan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mewujudkan pembangunan nasional di bidang pendidikan dan peningkatan serta penyempurnaan pendidikan nasional maka pemerintah telah menyusun satu sistem pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Fungsi Pendidikan nasional untuk mengembangkan dan menjamin kelangsungan hidup bangsa, maka pendidikan nasional berusaha untuk mengembangkan kemampuan, mutu dan martabat kehidupan manusia Indonesia; memerangi segala kekurangan, keterbelakangan dan kebodohan; memantapkan ketahanan nasional; serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan berlandaskan kebudayaan bangsa dan ke-Bhinneka Tunggal Ika-an, termasuk juga di dalamnya memerangi kemiskinan. Di dalam pendidikan nasional juga disebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan dan keterampilan tamatan pendidikan dasar. Pendidikan dasar mempunyai fungsi mempersiapkan bekal dasar bagi dasar bagi kehidupan yang diperlukan oleh setiap warga negara, paling tidak mempunyai kemampuan membaca, menulis dan berhitung serta menggunakan bahasa Indonesia, yang diperlukan oleh setiap warga negara, paling tidak mempunyai kemampuan membaca, menulis dan berhitung serta menggunakan bahasa Indonesia, yang diperlukan oleh setiap warga negara untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kebodohan dan kemiskinan berhubungan erat dengan pendidikan yang dimilikinya dan

pada umumnya mereka yang belum pernah mengenyam pendidikan sekolah atau buta huruf dan pernah sekolah tetapi tidak dapat melanjutkan/ menyelesaikan, hal ini biasanya disebabkan tingkat sosial ekonomi sangat rendah yang biasanya disebut putus sekolah. Kemiskinan dan kebodohan juga disebabkan kurangnya informasi tentang pendidikan karena mereka tinggal di daerah terpencil. Upaya pemerintah yang dilaksanakan adalah mewajibkan warga negara yang berumur tujuh tahun untuk mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara, sampai tamat, dan pemerintah akan mencanangkan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun pada bulan Mei 1994. Pelayanan pendidikan tidak hanya dilaksanakan melalui pendidikan sekolah saja, melainkan juga melalui jalur pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah mempunyai andil besar dalam ikut serta mencerdaskan bangsa, dan disinyalir sasaran pendidikan luar sekolah (PLS) erat hubungan dengan kemiskinan karena sasaran utama adalah warga masyarakat yang buta huruf dan putus sekolah; belum bekerja atau berpenghasilan rendah diutamakan yang berusia 7 s.d. 44 tahun serta mereka yang ingin menambah keterampilan dan pengetahuannya guna meningkatkan penghasilannya.

Pelayanan pendidikan dalam rangka memperluas kesempatan belajar dan bekerja ini telah dikembangkan oleh Kanwil Depdikbud Propinsi DIY dalam hal ini Bidang Pendidikan Masyarakat.

### **II. Program Pendidikan Masyarakat sebagai Alternatif dalam Penanggulangan Kemiskinan**

Keandalan PLS/Dikmas dalam menangani kebodohan dan kemiskinan adalah dalam hal pendekatan yang telah diterapkan sampai pada saat ini, walaupun dengan keterbatasan yang ada. Ada 3 pendekatan program pelayanan yang telah dilakukan oleh pendidikan masyarakat dalam menangani kebodohan dan kemiskinan antara lain :

#### **A. Program Pelayanan yang Dilaksanakan dengan Strategi Bertahap dan Bergilir**

Prioritas pertama dan utama yang dilayani adalah kecamatan-kecamatan peringkat terendah, dengan indikator paling banyak

buta hurufnya dan siswa putus sekolah dalam dan antar jenjang. Melalui proyek PPLS/Dikmas Pusat terpilih 1000 kecamatan (dari 27 propinsi)) dirancang untuk digarap secara intensif selama 5 tahun, mulai tahun 1992/1993 s.d. 1996/1997. Dari 1000 kecamatan berdasarkan indikator tahun 1992/1993 terpilih 300 kecamatan sudah mulai digarap, tahun 1993/1994 450 kecamatan mulai digarap dan tahun 1994/1995 akan digarap 250 kecamatan. Dari kecamatan terpilih, dipilih satu sampai dua desa yang paling banyak buta huruf dan putus sekolah, selanjutnya secara bertahap dan bergilir menggarap desa lainnya sesuai peringkat yang telah disusun. Semua program dialokasikan pada kecamatan terpilih dan ditumpahkan pada desa yang diprioritaskan dengan dukungan tenaga setiap kecamatan 4 - 5 sarjana S1 yang dikontrak.

Untuk DIY tahun 1992/1994 mendapat jatah 5 kecamatan intensif yang ditempatkan di lima Dati II, yaitu :

1. Kabupaten Bantul : Kecamatan Kretek  
Desa Intensif  
Parangtritis
2. Kabupaten Sleman : Kecamatan Cangkringan  
Desa Intensif  
Umbulharjo
3. Kabupaten Kulon Progo : Kecamatan Kalibawang  
Desa Intensif  
Banjararum
4. Kabupaten Gunung Kidul: Kecamatan Rongkop  
Desa Intensif Jepitu
5. Kodya Yogyakarta : Kecamatan Umbulharjo  
Kal. Intensif Sorosutan

Tahun 1993/1994 mendapat jatah 2 kecamatan untuk Kabupaten Gunung Kidul, yaitu:

1. Kecamatan Playen : Desa Intensif Banaran
2. Kecamatan Paliyan: Desa Intensif Kepek.

Tahun 1994/1995 direncanakan dua kecamatan untuk Kabupaten Gunung Kidul, yaitu Kecamatan Semin dan Kecamatan Nglipar. Sedang kecamatan lainnya di luar kecamatan intensif juga digarap walaupun kapasitas layanan lebih rendah.

#### B. Program Pelayanan Pendidikan Dikaitkan dengan Sosial Ekonomi

Program PLS/Dikmas yang dicurahkan di daerah intensif meliputi :

1. Program Pendidikan Dasar, yaitu : Program Kejar Paket A dan Kejar Paket B.

Program Kejar Paket A bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dasar, dan sikap warga masyarakat guna mengusahakan mata pencaharian sebagai sumber nafkah yang tetap dan layak, sehingga mampu membiayai sendiri kegiatan pendidikan dan memperoleh pengetahuan setara sekolah dasar.

Program Kejar Paket B bertujuan meningkatkan kualitas manusia lulusan SD/MI, program kejar Paket A, Uper SD dan putus SLTP sehingga mereka dapat mengembangkan pribadinya, bermatapencaharian tetap dan layak serta memperoleh pendidikan setara SLTP.

Kedua program tersebut di atas dapat meningkatkan status sosial karena dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau dapat meningkatkan pekerjaan sesuai dengan pendidikan yang dimiliki.

Apabila dilihat dari segi ekonomi mereka telah mempunyai matapencaharian yang tetap sehingga dapat untuk menjamin kelangsungan hidup.

2. Program Pendidikan Matapencaharian, yaitu : Program Kejar Usaha dan Magang.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap warga masyarakat yang tidak buta huruf, putus sekolah, minimal sudah memiliki kemampuan atau keterampilan dan kegiatan dalam suatu usaha agar memperoleh mata pencaharian sebagai sumber penghasilan yang tetap dan layak dengan cara mengejar ketinggalan di bidang usaha.

3. Program Pendidikan Berkelanjutan : meliputi berbagai kursus keterampilan yang diselenggarakan oleh masyarakat (Diklusemas).

Program ini bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat mengembangkan diri pribadi atau memperoleh kesempatan kerja yang lebih besar, bekerja mencari nafkah sehingga dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Apabila ditinjau dari segi sosial, maka masyarakat dengan program tersebut sudah dapat

menyelenggarakan sendiri program yang diperoleh dan dapat menjadi sumber belajar atau pimpinan kursus, sehingga status sosial meningkat. Apabila ditinjau dari segi ekonomi, maka dapat menciptakan lapangan kerja baru sehingga penghasilannya meningkat.

Program-program tersebut diatas pada pokoknya bertujuan membantu memperbaiki kehidupan warga masyarakat yang tergolong keadaan sosial ekonominya rendah melalui pelayanan pendidikan dasar dan pendidikan mata pencaharian.

Dukungan pemerintah untuk mempercepat proses belajar-mengajar adalah dengan pemberian sarana belajar, pelatihan bagi tutor/fasilitator/penyelenggara program, tenaga lapangan SI, taman bacaan masyarakat dan dana belajar usaha untuk menunjang proses bekerja dan berusaha dalam rangka memperoleh mata pencaharian yang tetap dan layak.

Dana belajar Usaha yang disediakan untuk program-program tersebut di atas buka merupakan dana habis pakai, tetapi warga belajar mempunyai hak pakai selama masih melaksanakan proses belajar-bekerja-berusaha.

Dana tidak dibagikan kepada warga belajar tetapi dikumpulkan dikelola secara koperasi dengan menggunakan wadah PRA KOPERASI PLS. Otomatis warga belajar menjadi anggota Pra Koperasi dan dana belajar menjadi simpanan pokok. Warga belajar yang telah mampu mengusahakan matapencaharian, berhak meminjam modal pada Pra Koperasi PLS dan setiap ahun diadakan Rapat Anggota Tahunan serta pembagian sisa hasil usaha. Dana Belajar yang disediakan dikelola secara KUPEDES/POLA BANK. Dana dari Dikmas merupakan jaminan atau agunan dalam bentuk Simpedes untuk memperoleh kredit/KUPEDES.

Dengan pola ini dimaksudkan agar masyarakat yang dilayani dikemudian hari mampu memanfaatkan aset keuangan setempat dan pada gilirannya apabila usahanya berkembang diharapkan dapat berhubungan sendiri dengan Bank untuk menambah modal yang diperlukan, sehingga dana dapat berputar terus.

### III. Menumbuhkan Keswadayaan dan Pelembagaan Program

Dengan diberlakukannya Pola Bank/Kupedes dan Pola Pra Koperasi PLS bagi pengelolaan dana belajar yang ada di Dikmas maka berarti juga menumbuhkan keswadayaan dan pelembagaan program. Apabila kedua pola tersebut berhasil maka dana yang berkembang merupakan aset masyarakat, sehingga dapat untuk memenuhi/membiayai kebutuhan akan pendidikannya sendiri tanpa harus terus menerus mengharap bantuan dari pemerintah, tetapi apabila kekurangan modal dapat langsung pinjam melalui Bank atau Pra Koperasi PLS.

Untuk menangani program tersebut memang perlu diadakan kelembagaan yang tangguh, dalam hal ini Dikmas sudah mempunyai mitra yang tangguh, antara lain BRI Unit desa yang sudah tingkat Kecamatan dan Pra Koperasi PLS. Pengalaman menunjukkan apabila kedua lembaga tersebut dikelola dengan baik, tidak hanya dapat memberikan pelayanan pendidikan dengan biaya murah yang dapat dijangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah, tetapi juga dapat memberikan masukan dana pada negara.

Untuk memperkuat kedua lembaga tersebut, memang perlu adanya kerja sama dengan instansi lain atau lembaga sosial masyarakat, sehingga program-program yang telah ada dapat berkembang lebih luas lagi.

Demikianlah Program Pendidikan Masyarakat yang telah dilaksanakan sejak tahun 1992/1993 dan sudah dirintis tahun anggaran 1991/1992 dan Pola yang ditempuh oleh Bidang Dikmas DIY ini dijadikan Pola untuk seluruh Indonesia (27 Propinsi). Dengan adanya rencana pemerintah untuk memberikan dana Inpres khusus pada desa-desa miskin/terpencil maka akan lebih baik bila dana itu dikelola dengan Pola seperti tersebut di atas yaitu revolving atau penggabungan antara Pola Bank dan Koperasi. Diharapkan dengan pola tersebut akan menekan kebocoran-kebocoran dana yang dialokasikan pada setiap desa dan mempunyai daya guna dan hasil guna tinggi.